



PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN BMT KABUPATEN GARUT

Hani Siti Hanifah¹, Eliya Fatma Harahap²
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Abstrak

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut terlihat adanya permasalahan dalam tertib administrasi kaitannya dengan Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian sehingga mengakibatkan kurang tertibnya administrasi perkoperasian.

Tujuan penulisan ini menemukan data dan informasi mengenai besarnya pengaruh Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian terhadap tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut. Kegunaannya untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Adminitrasi Negara khususnya tentang Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian terhadap tertib administrasi.

Hasil dari penelitian secara keseluruhan perhitungan statistika korelasi dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman diketahui korelasi sebesar 0.49 dan Koefisien Determinasi 20,43%.

Kata Kunci : *Implementasi dan perkoperasian.*

1 Pendahuluan

Perkembangan koperasi dalam usaha jasa keuangan dihadapkan pada persaingan yang sangat tajam, kompleks dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Persaingan menjadi semakin ketat tatkala pemerintah membebaskan bank-bank asing membuka cabangnya di Indonesia sehingga terjadi persaingan antara bank lokal maupun bank asing berlomba-lomba menawarkan produk-produknya.

Situasi ini menggambarkan ketatnya persaingan untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas. Bahwa sektor jasa koperasi merupakan sektor yang paling besar mengalami perubahan akibat dari cepatnya perubahan yang dialami oleh faktor lain, seperti perubahan teknologi yang secara langsung menaikkan iklim kompetisi di dalam industri. Karena itu para pengelola koperasi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kesejahteraan anggota jangka panjang.

Hal itu terjadi pada koperasi di Kabupaten Garut karena adanya kontradiksi dalam pemahaman tentang koperasi. Secara substansial koperasi adalah gerakan rakyat untuk memberdayakan dirinya. Sebagai gerakan rakyat, maka koperasi tumbuh dari bawah (*bottom-up*) sesuai dengan kebutuhan anggotanya, salah satu bentuk koperasi yang ada di tataran paling bawah adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang pembentukannya KUD di bentuk oleh pemerintah. Padahal, rakyat sendiri belum paham akan gunanya KUD bagi mereka, sehingga akhirnya KUD itu tidak berkembang dan hanya menjadi justifikasi politik dari pemerintah agar timbul kesan bahwa pemerintah telah peduli pada perekonomian rakyat, atau dalam hal ini khususnya koperasi.

Menurut UU RI No. 17 tahun 12 tentang perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 96/kep/M.KUKM/IX/2004 adalah suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya baik terhadap anggota, calon anggota maupun koperasi lain. Sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan dengan menyuplai bantuan terhadap koperasi yang harus di kelola oleh koperasi itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 19/Per/M.KUKM/III/2007, bahwa dalam penyelenggaraannya koperasi dibantu oleh pemerintah dengan tujuan untuk menguatkan koperasi dalam penyelenggaraannya sesuai dengan peruntukannya.

Namun berbeda dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Garut, yang kebanyakan koperasi melaksanakan suakelola sendiri untuk memajukan koperasinya, hal lain yang menandakan adanya kontradiksi tentang koperasi di Kabupaten Garut dengan aturan yang ditentukan oleh pemerinah. Perkembangan koperasi di Kabupaten Garut cukup signifikan, hasil dari observasi penulis dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha Koperasi
di Kabupaten Garut Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016	Perkembangan
1.	Jumlah Koperasi	1.268	1.361	1.36 %
2.	Anggota	218.976	231.440	0.69%
3.	Modal	445.287.884.000	643.529.573.000	20.34%
4.	Usaha	497.335.764.000	644.090.845.000	36.66%

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut 2017

Dari tabel diatas terlihat adanya perkembangan tentang koperasi di Kabupaten Garut, namun walaupun demikian tidak sebanding dengan penduduk yang ada di Kabupaten Garut karena dalam menjalankan kegiatannya Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berupa bantuan sosial atau sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh yang diamanatkan dalam Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 116 bahwa untuk mengembangkan koperasi harus adanya sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi dan mengembangkan serta

mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;

Dalam dunia koperasi kebijakan tentang perkoperasian merupakan hal yang penting untuk menertibkan administrasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap anggota, karena produk utama dari koperasi adalah jasa untuk melayani transaksi keuangan anggota sehingga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan ke dua belah pihak.

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan di antaranya adalah :

1. Kurangnya Sosialisasi dari pimpinan tentang kebijakan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian kepada pegawai dan masyarakat dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut, sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang manfaat dan keuntungan dari koperasi.
2. Kurangnya penataan pegawai dari Pemerintah Pusat atau Daerah terkait tentang perkoperasian dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut karena lemahnya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai
3. Kurangnya sumberdaya manusia/Pegawai di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut, yang saat ini hanya berjumlah 66 Orang pegawai sedangkan koperasi, UMKM dan BMT di Kabupaten Garut dengan jumlah 1.361 karena idealnya satu pegawai membina 10 (sepuluh koperasi, UMKM dan BMT) .
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja pegawai di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut sehingga di indikasi masih belum tertibnya administrasi.

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penting bagi koperasi untuk mengetahui kebijakan tentang perkoperasian di mata pegawai dan masyarakat , khususnya bagi pegawai di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut.

2 Kajian Teori

Menurut Edwards III (dalam Iskandar, 2005:221-222) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dari teori diatas berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang Perkoperasian maka tujuan utamanya adalah untuk ketertiban administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT sehingga tidak terlepas keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kerjanya adalah dengan adanya jalinan kerjasama antara pimpinan dan pegawai sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai, sehingga lancarnya administrasi berarti menunjukkan bahwa administrasi suatu organisasi berjalan dengan baik.

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kerjanya adalah dengan terimplementasikannya kebijakan dengan baik sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai, sehingga lancarnya administrasi berarti menunjukkan bahwa administrasi suatu organisasi berjalan dengan baik.

Maka yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah suatu kondisi dimana penyelenggaraan kerja (administrasi) berjalan dengan lancar sesuai dengan yang

dikehendaki atau yang direncanakan, administrasi yang berjalan dengan tertib dan teratur merupakan salah satu unsur dari fungsi administrasi, karena baik tertib administrasi maupun fungsi administrasi sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengertian administrasi dikemukakan oleh Moekijat, (2010:41) bahwa :” administrasi adalah cara-cara yang dipegunakan untuk mecapai tujuan”.

Tertib administrasi adalah kondisi yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan dan memimpin organisasi yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut tersebut sebagaimana dikemukakan Moekijat, (2010:40) bahwa: ”administrasi adalah kegiatan yang meliputi tiga fungsi pokok yaitu” (a) Merencanakan apa yang harus dikerjakan (b) Mengorganisir dalam arti menyusun organisasi yang diperlukan (c) Memimpin organisasi itu agar tujuannya tercapai”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat difahami bahwa administrasi dikatakan berjalan dengan tertib apabila : (1) Perencanaan dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, (2) Kegiatan perencanaan terorganisir dengan baik, dan (3) Kegiatan dipimpin dengan baik.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif, merupakan metode konvensional, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey. Metode ini bertujuan mengungkapkan permasalahan serta mengkaji dan menganalisis variabel yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji hubungannya dengan pemaparan variabel-variabel atau hubungan antara dua variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai yang ada di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut, yang berjumlah 66 orang.dari populasi tersebut diambil sampelnya adalah 39,75 di bulatkan menjadi 40 sampel.

4. Hasil dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian terhadap tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan tanggapan responden dari setiap indikator dimensi Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian, rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik terhadap Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut. Hal ini terbukti dengan diperolehnya tingkat total rata-rata tanggapan responden terhadap Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian yang menyatakan sangat setuju adalah 20 responden atau 49,72% yang menyatakan setuju adalah 18 responden atau 45,56% dan yang menyatakan ragu-ragu adalah 2 responden atau 4.72%, dengan Skor total (FxS) sebesar 178, artinya bahwa variabel implementasi kebijakan tentang perkoperasian di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut mempunyai korelasi sangat kuat dan dinyatakan baik.

Sedangkan tanggapan responden dari setiap indikator tertib administrasi rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan

diperolehnya tingkat total rata-rata tanggapan responden yang menyatakan setuju adalah 18 responden atau 45,31% dan yang menyatakan ragu-ragu adalah 5 responden atau 11,38%, Skor total dari tabel diatas adalah (FxS) sebesar 173, artinya bahwa tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garutsudah cukup baik karena hal ini mempunyai hubungan yang sangat kuat antara impelemntasi kebijakan tentang perkoperasian dengan tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut.

Pengaruh Implementasi kebijakan tentang Perkoperasian terhadap tertib administrasi. Secara keseluruhan perhitungan statistika korelasi dengan menggunakan Koefisien Korelasi Rank Spearman diketahui korelasi sebesar 0.49 dan Koefisien Determinasi 20,43%. Jadi dengan demikian, antara kedua variabel tersebut berdasarkan interpretasi korelasi merupakan pengaruh yang moderat tinggi (*Moderately High Association*) dan tergolong kuat, artinya Implementasi kebijakan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sangat berpengaruh terhadap tertib administrasi, walaupun terdapat pengaruh lain selain Implementasi kebijakan tentang Perkoperasian, pengaruh itu sangat kecil dan diperkuat dengan tingkat signifikansi t_{hitung} sebesar 3.55 dan setelah dikonfirmasi dengan t_{tabel} diperoleh sebesar 1.69 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima karena $t_{hitung} \geq$ dari t_{tabel} .

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang Implementasi kebijakan Tentang Perkoperasian, rata-rata setiap indikator memberikan tanggapan yang baik Sedangkan tanggapan responden dari setiap indikator tertib administrasi sudah cukup baik karena hal ini mempunyai hubungan yang sangat kuat antara impelemntasi kebijakan tentang perkoperasian dengan tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut. Dan Pengaruh Implementasi kebijakan tentang Perkoperasian terhadap tertib administrasi. Dengan menggunakan perhitungan statistika korelasi dengan Koefisien Korelasi Rank Spearman diketahui korelasi sebesar 0.49 dan Koefisien Determinasi 20,43%. dan diperkuat dengan tingkat signifikansi t_{hitung} sebesar 3.55 dan setelah dikonfirmasi dengan t_{tabel} diperoleh sebesar 1.69 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima karena $t_{hitung} \geq$ dari t_{tabel} .

6. Rekomendasi

Dalam meningkatkan tertib administrasi di Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut maka harud dapat mensosialisasikan kebijakan kaitannya dengan perkoperasian agar lebih meningkat dan berjalan dengan baik.

7. Ucapan Terima Kasih

Sebagai ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kepala Dinas Koperasi, UMKM Dan BMT Kabupaten Garut dan seluruh staf yang sudah membantu dalam memberikan informasi dan data penyelesaian penelitian ini

Daftar Pustaka

- Basu, Swastha DH. (2001). Azas-azas Marketing. Yogyakarta : Edisi Keempat. Liberty.
- Dunn, William N. (2002). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samudra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta : Gajah Mada University Press:.
- Dye, Thomas R. (1981). Understanding Publik Policy. Englewood, Cliffs, Prentice Hall, Inc.,
- Handyaningrat, Soewarno. (1996). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : GM University Press:
- Henry, Simamora. (2000). Manajemen Pemasaran Internasional. Jakarta : Jilid 2. Salemba Empat.
- Islamy, M. Irfan. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara,.
- Kencana, Syaifiie, Inu. (2006), Ilmu Administrasi Publik, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Kotler, Philip. (2000). Manajemen Pemasaran. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Jilid 2. Alih bahasa oleh Hendra Teguh. PT. Prehalindo.
- Moekijat. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Maju Mundur.
- Riduwan. (2003). Dasar-Dasar Statistika. Bandung : Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2001). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju.
- Siegel, Sidney. (1992). Statistik Non Parametrik. Alih bahasa Sayuti dan Simatupang, Cet. Ke IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang. (2007). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tim Hindle and Michael Thomas. (1994). Seri Intisari Manajemen Pemasaran. Alih bahasa oleh Domiano Q Roosmin, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Umar, Husein. (2003). Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Cetakan kelima. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik.. Bandung: Alfabeta.
- Zyman, Sergion and Miller, Scott. (2002). Building Merekwidth. Alih bahasa oleh Drs. Alexander Sindoro, Batam : Interaksara..
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Dokumen :

- UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 96/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman pelaksanaan perkoperasian
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 19/Per/M.KUKM/III/2007 tentang Bantuan dana untuk Koperasi
- Peraturan Bupati Garut Nomor 532 tahun 2012 tentang TUPOKSI dan tata kerja Dinas Koperasi UMKM dan BMT